

Peran Pengajaran IPS, Sejarah, dan PKn sebagai Upaya Untuk Pembangunan Karakter Generasi Bangsa

Andik Wahyun Muqoyyidin¹

Abstracts

The condition of Indonesian social life in the last decade is very crucial. Frequently the group-conflict happens, either between social or ethnic groups or between students or the young one another. Uncontrolled moral ethics and drugs in them are also in serious condition. To overcome such problems, we need an educational program of character building or revitalization of character education. Thus in place and reasonable that all providers of education institutions and students of education, busy thinking about it, how efforts to improve the character of the nation through the revitalization of character education is to be implemented in educational institutions. The revitalization of character education is implemented in integrated and holistic approach, not as a school subject. Thus, most of them who are involved within the program must be a model of a good character as stated in the national norm which is based on Pancasila culture. Besides, they work together holistically, in integrative way, and comprehensively. Purpose of this literature review is to examine the role of teaching Social Studies, History, and Civics in an effort to build the character generation using qualitative methods and take the kind of library research. The results from the literature review showed that while there is a great role of teaching Social Studies, History, and Civics to participate and build the character of the generation of reliable and virtuous character.

Keywords: *Character Education, Teaching Social Studies, History, Civics, Generation Nation*

Pendahuluan

Kondisi kehidupan bangsa masyarakat Indonesia di era reformasi, dilihat dari sisi moral, mengundang perhatian banyak pihak. Sebagai bangsa yang warganya menganut asas-asas Pancasila, banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak diharapkan terjadi, seperti tawuran antar warga, tawuran antar pelajar, perbuatan-perbuatan amoral yang terkait antara lain dengan masalah seksual, narkoba, kecurangan dalam proses pendidikan, pemalsuan-pemalsuan ijazah dan sertifikat, dan sebagainya.

Atas dasar kondisi semacam itu, saat ini pemikiran bangsa Indonesia terkait dengan penyelenggaraan pendidikan terfokus kembali kepada pentingnya mengangkat

¹ Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang

masalah pendidikan karakter. Hal itu memang harus demikian, karena masalah karakter bangsa Indonesia harus dapat menunjukkan jati diri bangsa yang bermartabat, berkepribadian, ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pada tempatnya dan wajar bahwa semua lembaga penyelenggara pendidikan dan para pemerhati pendidikan, ramai memikirkannya, bagaimana upaya memperbaiki karakter bangsa melalui pendidikan karakter tersebut untuk dilaksanakan di lembaga-lembaga pendidikan. Sementara ini persepsi tentang pendidikan karakter masih berbeda-beda; sebagian pandangan menyatakan bahwa pendidikan karakter perlu diadakan secara monolitik dan dilaksanakan di semua lembaga pendidikan, seperti halnya mata pelajaran yang lain. Di waktu yang lampau telah dilakukan pendidikan budi pekerti yang pada dasarnya untuk membina karakter bangsa. Sebagian pandangan yang lain berpendapat bahwa pendidikan karakter dilaksanakan secara integratif di semua mata pelajaran dan bahkan secara holistik harus terefleksi dalam bentuk perilaku kehidupan di lembaga pendidikan.

Pemahaman Umum Tentang Karakter

Istilah *karakter* dipakai secara khusus dalam konteks pendidikan baru muncul pada akhir abad-18. Terminologi ini biasanya mengacu pada sebuah pendekatan idealis-spiritualis dalam pendidikan yang juga dikenal dengan teori pendidikan normatif. Yang menjadi prioritas adalah nilai-nilai transenden yang dipercaya sebagai motor penggerak sejarah, baik bagi individu maupun bagi sebuah perubahan sosial. Namun, sebenarnya pendidikan karakter telah lama menjadi bagian inti sejarah pendidikan itu sendiri, misalnya, kita temukan dalam cita-cita *Paideia* Yunani, *Humanitas* Romawi dan pedagogi Kristiani. Pendekatan idealis dalam masyarakat modern memuncak dalam ide tentang Kesadaran Roh Hegelian (filsafat Hegel). Perkembangan ini pada gilirannya mengukuhkan dialektika sebagai sebuah bagian integral dari pendekatan pendidikan karakter.

Renaissans yang mengusung kembali nilai-nilai humanisme ingin mengembalikan identitas manusia pada keseimbangannya yang sempat hilang diterjang oleh badai positivisme. Gerakan positivisme melalui pengalaman eksperimentalnya telah mencabut manusia dari roh yang menghidupinya. Roh yang tercabut dari manusia modern ini menimbulkan banyak ambiguitas dan optimisme palsu (*klise*) yang ditawarkan modernitas melalui daya nalar dan daya pikir manusia semata. Kegagalan-

kegagalan modernitas dan dampak absurd rasionalitas manusia yang meredusir manusia sekadar pada kemampuan “*cogito*” ala Descartes membuat para pendidik ingin kembali meletakkan transendentalitas manusia dalam kerangka pendidikan. Oleh karena itulah pada akhir abad-18 muncul polemik anti-positivis dan anti-naturalis dengan ditandai adanya sebuah kelahiran kembali melalui apa yang disebut sebagai arus balik, yaitu, “*arus balik ke Kant*” di Jerman dan Neo-Idealisme Gentilian dan Crocean di Italia yang mewarnai sejarah perkembangan pendidikan karakter.

Studi tentang karakter telah lama menjadi pokok perhatian para psikolog, pedagog, dan pendidik. Apa yang disebut karakter bisa dipahami secara berbeda-beda oleh para pemikir sesuai penekanan dan pendekatan mereka masing-masing. Oleh karena itu, memang tidaklah mudah menentukan secara definitif apa yang dimaksud dengan karakter.

Secara umum, kita sering mengasosiasikan istilah *karakter* dengan apa yang disebut dengan temperamen yang memberinya sebuah definisi yang menekankan unsur psikososial yang dikaitkan dengan pendidikan dan konteks lingkungan. Kita juga bisa memahami karakter dari sudut pandang behavioral yang menekankan unsur somatopsikis yang dimiliki individu sejak lahir. Di sini, istilah karakter dianggap sama dengan *kepribadian*. Kepribadian dianggap sebagai “*ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan seseorang sejak lahir.*”

Apakah karakter yang tampil dalam perangai, perilaku, atau tipologi kepribadian tertentu memang sudah cap mati dari sononya sehingga manusia mengalami determinasi natural atasnya? Jika determinisme alamiah memang ada, sejauh mana manusia memiliki kebebasan untuk mengatasinya? Bagaimana meletakkan pertumbuhan keutamaan dalam kerangka keterbatasan, namun sekaligus kemungkinan diri manusia untuk mengatasi keterbatasannya? Struktur antropologis apa yang kita miliki berhadapan dengan fenomena kontradiktif yang kita temukan dalam diri kita, yaitu antara kebebasan dan determinasi, antara karakter yang stabil dengan ekspresi periferikal atasnya yang sifatnya lebih dinamis dan mudah berubah?

Berbicara tentang karakter dalam pendidikan mau tidak mau kita mempertanyakan secara kritis gambaran manusia macam apa yang ada dalam kepala

kita. Benar kata Freire bahwa “setiap praksis pendidikan mengandaikan sebuah konsep tentang manusia dan dunia”. Dari gambaran manusia inilah kita mampu menurunkan jawaban-jawaban yang konsisten atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pendidikan. Untuk itu, perlulah pertama-tama kita mencoba mengenali dan memahami struktur antropologis yang ada dalam diri kita. Setiap usaha untuk memahami pendidikan karakter pertama-tama mesti menjawab pertanyaan fundamental tentang struktur dasar antropologis kodrat kita sebagai manusia.

Data-data inderawi kita secara spontan mampu membedakan antara orang yang baik dan orang yang jahat. Antara orang yang memiliki keutamaan dan mereka yang tidak memiliki keutamaan. Apakah sikap baik dan keutamaan ini memang inheren dalam diri semua manusia, atau menjadi keistimewaan orang-orang tertentu saja? Jika keutamaan itu merupakan sebuah karakter yang telah ada dari sononya, yang dimiliki oleh setiap pribadi, sifatnya statis, pendidikan karakter yang memberi perhatian pada proses perkembangan dan pertumbuhan menyempurna dari seorang individu menjadi tidak bermakna. Tidak akan ada gunanya mengusahakan pendidikan karakter sebab pada dasarnya manusia itu baik dan akan selalu menjadi manusia baik.

Namun, pendapat di atas berbeda dengan kenyataan. Masalahnya adalah, mengapa dalam masyarakat kita ada orang-orang yang benar-benar jahat? Mengapa ada seorang yang begitu anti pada kehidupan, menjadi pembunuh, culas terhadap sesamanya, gemar berperang dan suka melecehkan kemartabatan orang lain? Apakah orang-orang ini memang memiliki sifat demikian dari *sononya*? Jika pendapat pertama tidak sepenuhnya tepat, untuk menjelaskan fenomena kedua, mungkin kita bisa mengatakan bahwa dari *sononya* ada orang yang memiliki bakat menjadi orang baik, dan sebagian lain berbakat menjadi orang jahat.

Jika pandangan ini benar, pendidikan karakter tetap saja tidak ada gunanya bagi manusia sebab karakter baik atau buruk itu telah ada dari *sononya*. Usaha apa pun akan tetap mengondisikan seseorang sesuai dengan karakternya. Namun, pandangan ini tetap tidak memuaskan kita sebab dalam kenyataan kita melihat bahwa ada orang yang dulunya jahat sekarang menjadi baik. Dan sebaliknya, ada orang yang dulunya baik, sekarang menjadi jahat. Nah, bagaimana menjelaskan perubahan ini?

Proses perubahan, entah dari baik menjadi jahat atau sebaliknya, mengindikasikan kepada kita bahwa manusia itu memiliki daya-daya dinamis yang bisa

berubah, baik ke arah kebaikan maupun ke arah kejahatan. Jika manusia memiliki daya-daya dinamis ini, pendidikan karakter merupakan sebuah kesempatan, bukan aset yang telah dimiliki. Pendidikan karakter adalah sebuah peluang bagi penyempurnaan diri manusia. Dengan demikian, kita bisa memahami pendidikan karakter sebagai sebuah usaha manusia untuk menjadikan dirinya sebagai manusia yang berkeutamaan. Pendidikan karakter merupakan hasil dari usaha manusia dalam mengembangkan dirinya sendiri.

Namun, memahami pendidikan karakter sebagai hasil dari usaha manusia tidaklah tanpa masalah. Jika dipahami secara demikian, pendidikan karakter menjadi semacam tambahan atau asesoris bagi manusia berupa hasil dari pengembangan dirinya. Katakanlah dari *sononya* manusia memiliki titik berangkat yang sama, yaitu bahwa manusia itu pada dasarnya baik, di tengah perjalanan penyempurnaan diri itu ia mampu menambahkan kualitas berupa keutamaan dalam hidupnya melalui perbuatan dan tindakannya. Jika proses ini negatif, jadilah ia manusia yang defisit keutamaan sebab tindakannya cenderung pada hal-hal yang buruk dan jahat. Demikian juga sebaliknya. Manusia menambahkan sebuah keutamaan dalam dirinya ketika ia mampu menyempurnakan diri menjadi semakin lebih baik. Hasil-hasil usahanya ini dapat dilihat melalui perilaku dan keputusannya.

Jika kita memahami keutamaan sebagai buah-buah dari usaha manusia untuk mendidik dan membentuk karakternya, pendidikan karakter menjadi marginal. Ia sekadar menjadi asesoris bagi pertumbuhan hidup manusia. Ia menjadi sekadar tambahan sebab diukur melulu sebagai hasil dari proses belajar. Pendidikan karakter yang mengembangkan keutamaan hidup tidak ada bedanya dengan seseorang yang belajar mengemudikan mobil. Jika manusia itu mulanya tidak dapat mengendarai mobil, dengan berlatih secara terus-menerus ia sampai pada kemampuan dan keterampilan menyetir mobil. Ketika usaha ini berhasil, ia menambahkan satu kualitas dalam kepribadiannya, yaitu kemampuan menyetir mobil. Pendidikan karakter dianggap sebagai pengembangan satu kemampuan teknis di antara keterampilan lain yang mungkin dimiliki manusia, seperti main musik, teater, olahraga, dan lain-lain. Keutamaan itu menjadi sekadar kualitas yang ‘ditambahkan’ pada sebuah tubuh antropologis yang disebut manusia. Jadi, manusia yang tadinya tidak memiliki karakter, melalui pelatihan lantas memiliki kualitas tambahan yang disebut kemampuan untuk

berbuat baik, bertanggung jawab, dan lain-lain.

Apakah karakter hanyalah asesoris atau embel-embel semata yang menjadi nilai tambah seorang pribadi? Di mana kekhasan dan kepentingan pendidikan karakter dalam konteks keharmonisan dengan kodrat natural kita? Apakah karakter itu hanya berupa kualitas kepribadian yang ditambahkan pada seorang pribadi, atau justru karakter pada hakikatnya merupakan struktur inheren dalam diri manusia sehingga karakter merupakan sekaligus proses dan hasil (berupa kualitas kepribadian) pertumbuhan itu sendiri? Dengan kata lain apakah karakter itu sesungguhnya merupakan struktur antropologis transendental dari manusia itu sendiri?

Pendidikan Karakter: Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat

Tidak ragu lagi pendidikan karakter merupakan upaya yang harus melibatkan semua pihak rumah tangga dan keluarga sekolah dan lingkungan sekolah lebih luas (masyarakat). Karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyambung kembali hubungan dan *educational networks* yang nyaris terputus antara ketiga lingkungan pendidikan ini. Pembentukan dan pendidikan karakter tidak akan berhasil selama antara ketiga lingkungan pendidikan tidak ada kesinambungan dan harmonisasi.

Dengan demikian, rumah tangga dan keluarga sebagai lingkungan pembentukan dan pendidikan karakter pertama dan utama mestilah diberdayakan kembali. Sebagaimana disarankan Phillips, keluarga hendaklah kembali menjadi *school of love*, sekolah untuk kasih sayang (Phillips, 2000). Dalam perspektif Islam, keluarga sebagai *school of love* dapat disebut sebagai *madrrasah mawaddah wa rahmah*, tempat belajar yang penuh cinta sejati dan kasih sayang.

Tidak perlu diungkapkan panjang lebar, Islam memberikan perhatian yang sangat besar kepada pembinaan keluarga (*usrah*). Keluarga merupakan basis dari *ummah* (bangsa); dan karena itu keadaan keluarga sangat menentukan keadaan *ummah* itu sendiri. Bangsa terbaik (*khayr ummah*) yang merupakan *ummah wâhidah* (bangsa yang satu) dan *ummah wasath* (bangsa yang moderat), sebagaimana dicita-citakan Islam hanya dapat terbentuk melalui keluarga yang dibangun dan dikembangkan atas dasar *mawaddah wa rahmah*.

Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan Anas ra., keluarga yang baik memiliki empat ciri. *Pertama*, keluarga yang memiliki semangat (*ghîrah*) dan kecintaan

untuk mempelajari dan menghayati ajaran-ajaran agama dengan sebaik-baiknya untuk kemudian mengamalkan dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. *Kedua*, keluarga di mana setiap anggotanya saling menghormati dan menyayangi; saling asah dan asuh. *Ketiga*, keluarga yang dari segi nafkah (konsumsi) tidak berlebihan; tidak *ngoyo* atau tidak serakah dalam usaha mendapatkan nafkah; sederhana atau tidak konsumtif dalam pembelanjaan. *Keempat*, keluarga yang sadar akan kelemahan dan kekurangannya; dan karena itu selalu berusaha meningkatkan ilmu dan pengetahuan setiap anggota keluarganya melalui proses belajar dan pendidikan seumur hidup (*long life education*). Datang dari keluarga *mawaddah wa rahmah* dengan ciri-ciri seperti di atas, maka anak-anak telah memiliki potensi dan bekal yang memadai untuk mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Dan, sekali lagi, sekolah—seperti sudah sering dikemukakan banyak orang—seyogianya tidak hanya menjadi tempat belajar, namun sekaligus juga tempat memperoleh pendidikan, termasuk pendidikan karakter.

Sekolah, pada hakikatnya bukanlah sekadar tempat *transfer of knowledge* belaka. Seperti dikemukakan Fraenkel, sekolah tidaklah semata-mata tempat di mana guru menyampaikan pengetahuan melalui berbagai mata pelajaran. Sekolah juga adalah lembaga yang mengusahakan usaha dan proses pembelajaran yang berorientasi pada nilai (*value oriented enterprise*). Lebih lanjut, Fraenkel mengutip John Childs yang menyatakan, bahwa organisasi sebuah sistem sekolah dalam dirinya sendiri merupakan sebuah usaha moral (*moral enterprise*), karena ia merupakan usaha sengaja masyarakat manusia untuk mengontrol pola perkembangannya.

Pembentukan dan pendidikan karakter melalui sekolah, dengan demikian, tidak bisa dilakukan semata-mata melalui pembelajaran pengetahuan, tetapi adalah melalui penanaman nilai-nilai. Apakah nilai-nilai tersebut? Secara umum, kajian-kajian tentang nilai biasanya mencakup dua bidang pokok: estetika dan etika (atau akhlak, moral, budi pekerti). Estetika mengacu kepada hal-hal tentang dan justifikasi terhadap apa yang dipandang manusia sebagai “indah”, apa yang mereka senangi. Sedangkan etika mengacu kepada hal-hal tentang dan justifikasi terhadap tingkah laku yang pantas berdasarkan standar-standar yang berlaku dalam masyarakat, baik yang bersumber dari agama, adat istiadat, konvensi, dan sebagainya. Dan standar-standar itu adalah nilai-nilai moral atau akhlak tentang tindakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Lingkungan masyarakat luas jelas memiliki pengaruh besar terhadap

keberhasilan penanaman nilai-nilai estetika dan etika untuk pembentukan karakter. Dari perspektif Islam, menurut Quraish Shihab, situasi kemasyarakatan dengan sistem nilai yang dianutnya, mempengaruhi sikap dan cara pandang masyarakat secara keseluruhan. Jika sistem nilai dan pandangan mereka terbatas pada “kini dan di sini”, maka upaya dan ambisinya terbatas pada kini dan di sini pula.

Dalam konteks itu, Al-Qur’an dalam banyak ayatnya menekankan tentang kebersamaan anggota masyarakat menyangkut pengalaman sejarah yang sama, tujuan bersama, gerak langkah yang sama, solidaritas yang sama. Di sinilah, tulis Quraish Shihab, muncul gagasan dan ajaran tentang *amar ma’rūf* dan *nahy munkar*, dan tentang *fardhu kifâyah*, tanggung jawab bersama dalam menegakkan nilai-nilai yang baik dan mencegah nilai-nilai yang buruk.

Berdasarkan *grand design* yang dikembangkan Kemendiknas (2010), secara psikologis dan sosial-kultural pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, konatif dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial-kultural (dalam keluarga, sekolah dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural tersebut dapat dikelompokkan dalam: Olah Hati (*Spiritual and emotional development*), Olah Pikir (*Intellectual development*), Olah Raga dan Kinestetik (*Physical and kinesthetic development*), serta Olah Rasa dan Karsa (*Affective and creativity development*).

Pendidikan Karakter: Menanamkan Nilai-nilai

Pembentukan dan pendidikan karakter melalui sekolah merupakan usaha mulia yang mendesak untuk dilakukan. Bahkan, kalau kita berbicara tentang masa depan, sekolah bertanggung jawab bukan hanya dalam mencetak peserta didik yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dalam karakter dan kepribadian. Dan hal ini relevan dan kontekstual bukan hanya di negara-negara yang tengah mengalami krisis karakter seperti Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara maju (cf. Fraenkel, 1977; Kirschenbaum & Simon, 1974).

Usaha pembentukan dan pendidikan karakter melalui sekolah, hemat Azra, bisa dilakukan setidaknya melalui pendekatan, sebagai berikut:

Pertama, menerapkan pendekatan *modelling* atau *exemplary* atau *uswah*

hasanah. Yakni mensosialisasikan dan membiasakan lingkungan sekolah untuk menghidupkan dan menegakkan nilai-nilai akhlak dan moral yang benar melalui model atau teladan. Setiap guru dan tenaga kependidikan lain di lingkungan sekolah hendaklah mampu menjadi *uswah hasanah* yang hidup (*living exemplary*) bagi setiap peserta didik. Mereka juga harus terbuka dan siap untuk mendiskusikan dengan peserta didik tentang berbagai nilai yang baik tersebut.

Kedua, menjelaskan atau mengklarifikasikan kepada peserta didik secara terus-menerus tentang berbagai nilai yang baik dan yang buruk. Usaha ini bisa dibarengi pula dengan langkah-langkah; memberi penghargaan (*prizing*) dan menumbuhkan (*cherising*) nilai-nilai yang baik, dan sebaliknya mengecam dan mencegah (*discouraging*) berlakunya nilai-nilai yang buruk; menegaskan nilai-nilai yang baik dan buruk secara terbuka dan kontinu; memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih berbagai alternatif sikap dan tindakan berdasarkan nilai; melakukan pilihan secara bebas setelah menimbang dalam-dalam berbagai konsekuensi dari setiap pilihan dan tindakan; membiasakan bersikap dan bertindak atas niat dan prasangka baik (*husn al-zhan*) dan tujuan-tujuan ideal; membiasakan bersikap dan bertindak dengan pola-pola yang baik yang diulangi secara terus-menerus dan konsisten.

Ketiga, menerapkan pendidikan berdasarkan karakter (*character-based education*). Hal ini bisa dilakukan dengan menerapkan *character-based approach* ke dalam setiap mata-pelajaran yang ada di samping matapelajaran-matapelajaran khusus untuk pendidikan karakter, seperti pelajaran agama, sejarah, Pancasila, dan sebagainya. Memandang kritik terhadap matapelajaran-matapelajaran terakhir ini, maka perlu dilakukan reorientasi baik dari segi isi/muatan dan pendekatan, sehingga mereka tidak hanya menjadi verbalisme dan sekadar hafalan, tetapi betul-betul berhasil membantu pembentukan karakter.

Peran Pembelajaran IPS bagi Pembangunan Karakter

Membahas tentang IPS dan pembelajaran IPS, selalu menarik dan menantang. Pasalnya sejak IPS ini “digelindingkan” sebagai kajian dan mata pelajaran di sekolah pada tahun 1968-an sampai sekarang, belum pernah tuntas. Masing-masing ahli dapat merumuskan pengertian IPS sesuai dengan disiplin dan pandangan masing-masing, begitu juga bagaimana cara membelajarkannya.

Sebutan IPS di Indonesia adalah sebuah kesepakatan untuk menunjuk istilah lain dari *social studies*. Sebutan *social studies* ini untuk menunjuk sifat keterpaduan dari ilmu-ilmu sosial (*integrated social sciences*) (dalam Zamroni, 2010: 7). Jadi sifat keterpaduan itu mestinya menjadi ciri pokok mata kajian yang disebut IPS. Oleh karena itu, S. Hamid Hasan (2010) menegaskan bahwa IPS adalah studi integratif tentang kehidupan manusia dalam berbagai dimensi ruang dan waktu dengan segala aktivitasnya. Dalam rumusan yang lain, IPS merupakan kajian yang terkait dengan kehidupan sosial kemasyarakatan beserta lingkungannya untuk kepentingan pendidikan dan pembentukan para pelaku sosial. Selanjutnya dalam UU Sisdiknas, dijelaskan bahwa IPS merupakan bahan kajian yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang antara lain mencakup ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya yang dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat (penjelasan pasal 37). Sementara itu kalau mengacu pada kajian *social studies*, *National Council for Social Studies* (NCSS) dijelaskan bahwa:

“Social studies are the integrated study of the social sciences and humanities to promote civic competence. Within the school program, social studies provides coordinated, systematic study drawing upon such disciplines as anthropology, archaeology, economics, geography, history, law, philosophy, political science, psychology, religion, and sociology, as well as appropriate content from the humanities, mathematics, and the natural sciences. The primary purpose of social studies is to help young people develop the ability to make informed and reasoned decisions for the public good as citizens of a culturally diverse, democratic society in an interdependent world” (1994: 3).

Relevan dengan pengertian itu, M. Numan Soemantri (2001: 92) menegaskan bahwa program pendidikan IPS merupakan perpaduan cabang-cabang ilmu-ilmu sosial dan humaniora termasuk di dalamnya agama, filsafat, dan pendidikan. Bahkan IPS juga dapat mengambil aspek-aspek tertentu dari ilmu-ilmu kealaman dan teknologi.

Dengan pengertian itu berarti IPS merupakan pelajaran yang cukup komprehensif yang dapat menjadi salah satu instrumen untuk memecahkan masalah-masalah sosio-kebangsaan di Indonesia, sesuai dengan kadar kemampuan dan tingkat perkembangan peserta didik. Sebagai mata pelajaran di sekolah, mestinya IPS lebih bersifat edukatif ketimbang akademis. Dalam kaitan ini Barr dkk. (dikutip dari Udin. S. Winataputra, 2010: 11-12) menguraikan adanya tiga tradisi pedagogis dalam kajian IPS.

Pertama, Tradisi, *Social Studies Taught as Citizenship Transmission*. Tradisi ini bertujuan untuk mengembangkan warga negara yang baik, sesuai dengan nilai dan norma yang ada di suatu masyarakat, bangsa atau negara. *Kedua*, Tradisi, *Social Studies Taught as Social Science*. Tradisi ini terkait dengan pembentukan warga negara yang baik, yang ditandai dengan kemampuan dalam melihat dan mengatasi masalah-masalah sosial dan personal dengan menggunakan cara kerja ilmuwan sosial. *Ketiga*, Tradisi, *Social Studies Taught as Reflective Inquiry*, merupakan tradisi yang ditandai dengan pembentukan warga negara yang baik dengan ciri utamanya kemampuan mengambil keputusan dalam upaya mencari nilai tambah dan memecahkan masalah-masalah sosial. Berangkat dari uraian tersebut, maka secara umum dapat dirumuskan tujuan pembelajaran IPS, antara lain mengantarkan, membimbing dan mengembangkan potensi peserta didik agar: (1) menjadi warga negara (dan juga warga dunia) yang baik; (2) mengembangkan pemahaman mengenai pengetahuan dasar keekonomian, kesejarahan, kegeografian, kesosiologian, kewarganegaraan dan kemasyarakatan, secara terpadu; (3) mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan penuh kearifan dan ketrampilan inkuiri untuk dapat memahami, menyikapi dan mengambil langkah-langkah untuk ikut memecahkan masalah sosial kebangsaan; (4) membangun komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan menghargai serta ikut mengembangkan nilai-nilai luhur dan budaya Indonesia, dan (5) mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, baik lokal, regional maupun internasional.

Apa kriteria dan siapa yang dikatakan sebagai warga negara yang baik, yang mampu berpikir kritis dan arif terhadap masalah sosial, memiliki kemampuan berkomunikasi dan ketrampilan inkuiri, serta memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan pengembangan budaya bangsa itu? Mereka itu adalah warga negara (dan warga dunia) yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME; setia kepada dasar falsafah dan ideologi negara Pancasila; disiplin menaati semua peraturan hukum dan norma-norma yang berlaku; memenuhi kewajibannya sebagai warga negara; menghormati dan dapat bekerja sama dengan anggota warga negara dan bangsa yang lain; ikut menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan; demokratis dan bertanggung jawab, memiliki kemandirian, tenggang rasa, toleransi dan memahami perasaan semua warga, bangsa, agama dan kebudayaan; menggunakan hak-haknya secara tepat dan proporsional. Mereka dilatih untuk bersikap arif, santun dan tidak

emosional dalam memahami, menyikapi dan ikut serta dalam memecahkan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan. Mereka diharapkan memiliki kepekaan sosial dan rasa empati. Peserta didik dilatih untuk terampil mengambil keputusan yang membawa kemandirian dan stabilitas sosial (Sardiman AM, 2006: 6). Pembelajaran IPS juga diharapkan dapat melatih peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dan ketrampilan seperti berkomunikasi, beradaptasi, bersinergi, bekerja sama, bahkan berkompetisi sesuai dengan adab dan norma-norma yang ada. Selanjutnya para peserta didik diharapkan menghargai dan merasa bangga terhadap warisan budaya dan peninggalan sejarah bangsa, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai budi pekerti luhur, mencontoh nilai-nilai keteladanan dan kejujuran para pahlawan, para pemuka masyarakat dan pemimpin bangsa, memiliki kebanggaan nasional dan ikut mempertahankan jati diri bangsa.

Kalau dicermati uraian tentang pengertian dan tujuan IPS, maka pendidikan IPS sebenarnya sangat erat kaitannya dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan moral atau pendidikan budi pekerti itu memiliki arah dan tujuan yang sama dengan tujuan pembelajaran IPS, yakni sama-sama bertujuan agar peserta didik menjadi warga negara yang baik.

Pendidikan Sejarah sebagai Basis Pendidikan Karakter

Dalam tesis Rochiati Wiriatmadja disampaikan bahwa pengajaran Sejarah Nasional Indonesia di sekolah memiliki kompetensi untuk mengarahkan peserta didik kepada sasaran pendidikan, apabila dalam proses belajar mengajar berlangsung pendidikan nilai yang akan membimbingnya agar siswa tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang beradab, penuh rasa susila, dan memiliki tanggung jawab sosial. Dalam konsepsi ini, pengajaran sejarah nasional Indonesia di sekolah memiliki kompetensi untuk membimbing peserta didik ke arah kesadaran sejarah, kesadaran kebangsaan dan pembentukan karakter atau jati diri, apabila di dalam pengajarannya berlangsung pewarisan (*transfer*) yang disambut dengan peralihan nilai-nilai berbangsa, bertanah air, persatuan dan kesatuan, serta integritas dan kepribadian Indonesia.

Pendekatan pembelajaran sejarah yang saat ini sedang digalakkan adalah pendekatan yang bersifat konstruktivistik. Proses belajar mengajar dalam pendekatan ini, dilaksanakan secara sinergis oleh guru dan peserta didik dengan produk kegiatan

adalah membangun persepsi dan cara pandang siswa mengenai materi pelajaran yang dipelajari, mengembangkan masalah baru, dan membangun konsep-konsep baru dengan menggunakan evaluasi yang dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung (*on going evaluation*). Dengan sistem pengajaran ini, kualitas pengajaran dapat ditingkatkan, siswa dipandang sebagai individu yang mandiri yang memiliki potensi belajar dan pengembangan ilmu. Dalam pada itu, perkembangan kecakapan sosial dapat secara langsung dinilai oleh guru, terutama menyangkut pembentukan karakter atau *character building* di kalangan siswa.

Dalam rangka pengembangan pengajaran sejarah agar lebih fungsional dan terintegrasi dengan berbagai bidang keilmuan lainnya, maka terdapat berbagai bidang yang seyogyanya mendapat perhatian, yaitu: *pertama*, materi pelajaran sejarah harus mampu mengembangkan kecakapan sosial berupa integritas dan jati diri siswa, sehingga terbentuk karakter peserta didik yang memiliki sikap *nation hood*, kebersamaan dalam perbedaan, toleransi, empati, dan sikap-sikap positif lain yang berharga baik bagi dirinya, masyarakatnya, maupun bangsanya.

Materi pelajaran sejarah memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keragaman masyarakat Indonesia yang sangat heterogen. Oleh karena itu, pihak-pihak yang ikut bertanggungjawab dalam pengembangan materi pelajaran sejarah harus bersinergi satu sama lain baik antara ahli sejarah, sejarawan, ahli pendidikan sejarah, Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK), puskur, pusbuk, dalam rangka menghasilkan materi pelajaran sejarah yang *future oriented* dalam membangun sebuah peradaban yang luhur.

Kedua, untuk menjawab tantangan masa depan, kreativitas dan daya inovatif diperlukan agar bangsa Indonesia bukan sekedar menjadi konsumen IPTEK, konsumen budaya, maupun penerima nilai-nilai dari luar secara pasif, melainkan memiliki keunggulan komparatif dalam hal penguasaan IPTEK. Oleh karenanya, kreativitas perlu dikembangkan melalui penciptaan situasi proses belajar mengajar yang kondusif di mana pengajar mendorong vitalitas dan kreativitas peserta didik untuk mengembangkan diri. Peserta didik perlu diberi kesempatan untuk belajar dengan daya intelektualnya sendiri, melalui proses rangsangan-rangsangan baik yang berupa pertanyaan-pertanyaan maupun penugasan, sehingga peserta didik dapat melihat suatu hal dari berbagai sudut pandang dan dapat menemukan berbagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapi.

Ketiga, peserta didik akan dapat mengembangkan daya kreativitasnya apabila proses belajar mengajar dilaksanakan secara terencana untuk meningkatkan dan membangkitkan upaya untuk kompetitif. Oleh karena itu, proses belajar mengajar yang memberi peluang kepada peserta didik untuk menyelesaikan tugas secara kompetitif perlu disosialisasikan, kemudian juga perlu adanya penghargaan yang layak kepada mereka yang berprestasi. Hal ini akan berdampak positif terhadap terbentuknya rasa percaya diri pada peserta didik. Pada gilirannya, pengalaman ini selanjutnya dapat menjaga proses pembentukan kemandirian. Dalam hal ini peserta didik juga perlu dilibatkan dalam proses belajar mengajar yang memberikan pengalaman bagaimana peserta didik bekerja sama dengan peserta didik yang lain seperti dalam hal berdiskusi, membuat artikel kelompok, pengamatan, wawancara, dan sebagainya untuk dikerjakan secara kelompok. Pengalaman belajar seperti ini selanjutnya akan dapat membentuk sikap kooperatif dan ketahanan bersaing dengan pengalaman nyata untuk dapat menghargai segala kelebihan dan kelemahan masing-masing.

Keempat, dalam proses pengembangan kematangan intelektualnya, peserta didik perlu dipacu kemampuan berpikirnya secara logis dan sistematis. Dalam proses belajar mengajar, pengajar harus memberi arahan yang jelas agar peserta didik dapat memecahkan suatu persoalan secara logis dan ilmiah. Oleh karena itu peserta didik perlu dilibatkan secara aktif dalam proses belajar mengajar melalui pemberian tugas. Tugas tidak terlalu berat tetapi dapat memacu daya berpikir peserta didik. Salah satu aspek yang penting adalah bagaimana peserta didik dapat terlatih berpikir secara deduktif-induktif. Artinya, dalam proses belajar mengajar peserta didik perlu diarahkan sedemikian rupa sehingga mereka dapat mempelajari materi pelajaran melalui pengalaman. Dengan cara seperti ini mereka dapat secara langsung dihadapkan pada suatu realita di lapangan. Seperti halnya peserta didik disediakan model pembelajaran yang bersifat khusus yang memberikan pengalaman, berdiskusi, penelitian, dan lain sebagainya yang diarahkan untuk menarik kesimpulan baik deduktif maupun induktif.

Kelima, peserta didik harus diberi internalisasi dan keteladanan, dimana mereka dapat berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Fenomena ini dalam hal-hal tertentu dapat membentuk semangat loyalitas, toleransi, dan kemampuan adaptabilitas yang tinggi. Dalam hal pendekatan ini perlu diselaraskan dengan kegiatan proses belajar mengajar yang memberi peluang kepada mereka untuk berprakarsa secara dinamis dan

kreatif. Dengan demikian akan tercapai kualitas proses dan hasil belajar yang berorientasi pada pencapaian tujuan yang jelas, dengan melibatkan peserta didik secara maksimal melalui berbagai kegiatan yang konstruktif, sehingga pengalaman tersebut dapat mengantar mereka dalam suatu proses belajar yang kondusif dan kreatif.

Untuk menjawab tantangan ini, maka diperlukan program pembelajaran sejarah yang berorientasi pada masa depan, melibatkan peranan siswa secara penuh, dan membangun sikap kritis dalam pembelajaran sejarah. Bagi kalangan peserta didik, terlebih di tingkat SMA, maka sikap kritis dalam pembelajaran sejarah adalah tujuan yang hendak dicapai sebagaimana dijabarkan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar kurikulum sejarah. Dengan demikian, kesan bahwa pembelajaran sejarah hanyalah sebagai pelajaran hapalan, perlu segera dihilangkan. Pembelajaran sejarah kritis harus segera dilembagakan di sekolah-sekolah, dalam rangka memacu daya intelektualitas siswa menyangkut peristiwa-peristiwa lampau yang dibaca dalam kaca mata kekinian. Pembelajaran kritis harus menyentuh wilayah intelektual siswa, dan mampu membangun pemikiran interpretatif tentang peristiwa sejarah terutama menyangkut peristiwa-peristiwa yang faktanya masih bersifat lunak. Adapun luaran yang paling substantif adalah pembentukan karakter siswa berdasarkan pengalaman historis bangsanya, sehingga tertanam apa yang disebut nasionalisme, patriotisme, toleransi, kepribadian dan karakter-karakter positif yang perlu ditanamkan di kalangan peserta didik.

Untuk membangun pembelajaran sejarah yang *future oriented*, maka diperlukan perangkat-perangkat yang mendukung baik *hardware* maupun *software*. Untuk itu, perlu dievaluasi perangkat-perangkat pendukung pembelajaran tersebut, seperti halnya yang menyangkut kompetensi pedagogik dan akademik guru, sarana pendukung, motivasi siswa, latar belakang ekonomi siswa, materi pelajaran, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan keberhasilan program pembelajaran sejarah di SMA terlebih lagi terhadap efektivitas materi pelajaran sejarah dalam rangka *character building*.

PKN sebagai Basis Pendidikan Karakter

Karakter adalah nilai-nilai yang melandasi perilaku manusia berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum/konstitusi, adat istiadat dan estetika. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai perilaku (karakter) kepada warga sekolah

yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi insan kamil. Karakter bangsa adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas-baik yang tecermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa dan perilaku berbangsa dan bernegara sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang atau sekelompok orang. Karakter bangsa Indonesia akan menentukan perilaku kolektif kebangsaan Indonesia yang khas-baik yang tecermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa dan perilaku berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma UUD 1945, keberagaman dengan prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*, dan komitmen terhadap NKRI. Pendidikan karakter rakyat menurut Bung Hatta, adalah: mandiri, tahu kewajiban dan hak, mau mengambil tanggung jawab.

PKn sebagai basis pendidikan karakter merupakan salah satu misi yang harus diemban. Misi lain adalah sebagai pendidikan politik/pendidikan demokrasi, pendidikan hukum, pendidikan HAM dan bahkan sebagai pendidikan anti korupsi. Dibandingkan dengan mata pelajaran lain, mata pelajaran PKn dan Agama memiliki posisi sebagai ujung tombak dalam pendidikan karakter. Maksudnya dalam kedua mata pelajaran tersebut pendidikan karakter harus menjadi tujuan pembelajaran. Perubahan karakter peserta didik merupakan usaha yang disengaja/direncanakan (*instructional effect*), bukan sekedar dampak ikutan/pengiring (*nurturant effect*). Hal ini dapat ditunjukkan bahwa komponen PKn adalah pengetahuan, ketrampilan dan karakter kewarganegaraan.

Dengan kata lain tanpa ada kebijakan pengintegrasian pendidikan karakter ke dalam berbagai mata pelajaran, PKn harus mengembangkan pendidikan karakter. Lebih-lebih dengan adanya kebijakan pengembangan pendidikan karakter yang terintegrasi, ini merupakan tantangan untuk menunjukkan bahwa PKn sebagai ujung tombak yang tajam bukan tumpul bagi pendidikan karakter.

PKn sebagai basis pendidikan karakter dapat dikenali dari konsep, tujuan, fungsi, tuntutan kualifikasi dan keunikan PKn. PKn (*Civic Education*) adalah pembelajaran yang menggugah rasa ingin tahu dan kepercayaan (*trust*) terhadap norma-norma sosial yang mengatur hubungan personal dalam masyarakat sebagaimana mengatur partisipasi politik. PKn merupakan “mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan

kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945” (BSNP, Standar Isi).

Tujuan PKn adalah agar peserta didik memiliki kemampuan:

1. Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti-korupsi
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (BSNP, Standar Isi).

Fungsi PKn adalah wahana untuk membentuk warga negara cerdas, terampil dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 (Direktorat P-SMP).

Sedangkan kompetensi guru PKn yang bersifat khusus: (Permendiknas No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru) meliputi:

1. Memahami materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran PKn
2. Memahami substansi PKn yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), dan ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*)
3. Menunjukkan manfaat mata pelajaran PKn.

Keunikan PKn digambarkan John Potter, dalam *Citizenship Education* substansinya berisikan tentang hak-hak kita, tetapi harus diakui memiliki tiga keunikan yang membedakannya dengan mata pelajaran lain, (1) *Linked with other subject*, maksudnya sekolah harus mendukung secara eksplisit untuk mengkaitkan PKn dengan mata pelajaran yang lain; (2) *A way of life*, maksudnya PKn harus mengakar dalam pandangan hidup dan etos sekolah secara keseluruhan; dan (3) *Participation*, maksudnya PKn memerlukan generasi muda (*young people*) untuk belajar melalui

partisipasi dan pengalaman nyata.

Kesimpulan

Pendidikan karakter secara harfiah bermakna segala sesuatu yang dilakukan guru, yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Hal ini mencakup keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya. Menurut T. Ramli (2003), pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat dan warga negara yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, esensi dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Nurul. 2011. *Manusia Bisa Jadi Teroris atau Koruptor*.
<http://news.okezone.com/read/2011/05/28/337/462045/manusia-bisa-jadi-teroris-atau-koruptor>
- Dwi Lestari, Riani. 2011. *Prihatin Sikap Anarkis, Kemendiknas Genjot Pendidikan Karakter*.
<http://kampus.okezone.com/read/2011/09/27/373/507652/prihatin-sikap-anarkis-kemendiknas-genjot-pendidikan-karakter>
- Koesoema A, Doni. 2010. *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Grasindo: Jakarta.
- PP No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Soyomukti, Nurani. *Pendidikan Sejarah sebagai Basis Pendidikan Karakter*. Opini dimuat di Harian JURNAL NASIONAL, 07/09/2011.
- Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Zahro, Ahmad. 2011. *Pendidikan Karakter: Perspektif Psycho-Religious*; makalah dalam Workshop Pendidikan Berkarakter UNIPDU Jombang.